

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi dampak kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Purwokerto Timur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dengan menghilangkan stigma terhadap sekolah favorit serta mendistribusikan peserta didik secara lebih merata. Teori kebijakan publik yang digunakan menurut Thomas R. Dye, menunjukkan bahwa kebijakan harus mampu mencapai keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Secara teoritis, kebijakan zonasi ini mendukung konsep keadilan dalam pendidikan yakni dengan distribusi lebih merata tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi pada peserta didik.

Namun, dalam implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar karena sistem seleksi berbasis zonasi dinilai kurang mempertimbangkan aspek prestasi akademik. Selain itu, masih ditemukan praktik kecurangan, seperti manipulasi data domisili dan penggunaan dokumen yang tidak sah untuk memperoleh akses ke sekolah-sekolah yang lebih diminati. Ketimpangan kualitas antarsekolah juga menjadi kendala utama, mengingat belum semua sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang setara. Pendekatan evaluasi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan zonasi menghasilkan dampak jangka pendek berupa pemerataan distribusi siswa dan pengurangan biaya transportasi. Namun

untuk jangka panjangnya masih perlu dikaji lebih dalam, terutama mengenai peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap kurang favorit.

Adapun kelebihan dan kekurangan dalam penelitian mengenai evaluasi dampak kebijakan zonasi yaitu:

1) Kelebihan Penelitian

- a. Pendekatan Kualitatif yang Mendalam, artinya penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, sehingga dapat mengetahui eksplorasi data yang lebih mendalam terkait pengalaman dan persepsi informan.
- b. Analisis Multi-Perspektif, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari berbagai pihak seperti peserta didik, orang tua, seta tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
- c. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik, yakni penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas sistem zonasi dengan mengatasi tantangan yang ada.

2) Kekurangan Penelitian

- a. Hasil yang General, dikarenakan penelitian ini berfokus pada Kecamatan Purwokerto Timur, temuan yang diperoleh sehingga hasil tidak sepenuhnya mewakili kondisi di daerah lain dengan karakteristik pendidikan yang berbeda.

- b. Subjektivitas dalam Analisi Data, maknanya sebagai penelitian menggunakan metode kualitatif interpretasi data sangat bergantung pada analisis peneliti yang berpotensi dan dipengaruhi oleh bias persepsi.
- c. Keterbatasan Waktu dan Sampel, jumlah informan yang diwawancarai belum mencakup semua aspek yang bisa berkontribusi dalam mengevaluasi kebijakan zonasi secara menyeluruh.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Peserta Didik Baru Tingkat SMA Negeri di Kecamatan Purwokerto Timur Tahun Ajaran 2022/2023, terdapat beberapa rekomendasi atau saran pada kebijakan yang dapat diajukan supaya strategi pemerintah dapat memperbaiki kebijakan zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Tahun Ajaran berikutnya:

### 1) Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerintah perlu melakukan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah agar pemerataan pendidikan dapat terwujud. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan sertifikasi perlu diperkuat guna memastikan bahwa seluruh sekolah memiliki standar pendidikan yang setara.

### 2) Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Zonasi

Hendaknya perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan zonasi perlu dilakukan guna menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali sistem seleksi dengan menambahkan aspek prestasi akademik sebagai salah satu kriteria penerimaan peserta didik guna tetap mendorong semangat kompetitif dalam belajar.

### 3) Pencegahan Kecurangan dalam PPDB

Pengawasan yang lebih ketat terhadap dokumen administrasi yang digunakan dalam PPDB sangat diperlukan guna mencegah praktik kecurangan, seperti pemalsuan domisili. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sistem verifikasi data yang lebih transparan dan akuntabel serta memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

### 4) Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Zonasi

Perlunya perbaikan atau peningkatan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme kebijakan zonasi perlu ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemerataan pendidikan serta dapat mengurangi resistensi terhadap implementasi kebijakan ini.

Sehingga dengan adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan berkelanjutan, harapannya kebijakan zonasi ini dapat menjadi instrumen yang efektif guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas dan motivasi belajar peserta didik.